

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

2025-2029



Kabupaten Kepulauan Anambas



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah. Dengan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi. Renstra ini disusun sebagai bentuk perencanaan yang responsif terhadap tantangan pembangunan di bidang politik, kesatuan bangsa, dan pengelolaan konflik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik melalui masukan, data, maupun pemikiran strategis, dalam proses penyusunan dokumen ini. Harapan kami, Renstra ini tidak hanya menjadi panduan kerja, tetapi juga mampu mendorong sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, serta menjadi dasar untuk peningkatan kinerja organisasi yang lebih baik di masa mendatang.

Tarempa, 15 September 2025

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik



Herry Fakhrizal, S.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19730823 200312 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	8
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	23
BAB III	33
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
3.1 TUJUAN DAN SASARAN	33
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB IV	37
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	37
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB V	56
PENUTUP	56



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan.....	10
Tabel 2. 2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	11
Tabel 2. 3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin.....	11
Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Pendukung.....	13
Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas	16
Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	18
Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	24
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	35
Tabel 4. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Anambas	40
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Anambas	47
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	52
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD	53
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 –2029 merupakan upaya strategis dalam menjamin keberlangsungan perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menggariskan perlunya keterpaduan antara berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini menjadi dasar bagi setiap institusi pemerintahan untuk menyusun perencanaan yang terarah, sistematis, dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam konteks daerah, perencanaan pembangunan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan ini memberikan panduan teknis terkait tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dokumen pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra sebagai bagian integral dari RPJMD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tugas dan fungsi perangkat daerah selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

Sebagai lembaga yang berperan dalam penguatan kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di bidang kebangsaan dan kehidupan politik. Dengan adanya dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang



semakin kompleks, penyusunan Renstra ini menjadi penting untuk merumuskan strategi yang relevan dalam menjaga stabilitas politik, harmoni sosial, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Penyusunan dokumen ini juga bertujuan untuk menjawab kebutuhan perencanaan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Rancangan Akhir Renstra ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang inklusif.

Sebagai bentuk implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi, penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini mengacu pada data dan informasi yang valid, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya. Dengan demikian, Renstra Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman yang efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan panjang.

Melalui dokumen ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan landasan hukum yang kuat dan pendekatan yang holistik, Renstra ini diharapkan mampu menjadi pedoman yang strategis dan aplikatif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah ini.



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tentang Kerukunan Umat Beragama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembauran Kebangsaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



- Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan



- Anambas Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 76);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100)
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 105 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 105)
 23. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3. Maksud dan Tujuan

3.1.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



3.1.2. Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan arah kebijakan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai dengan isu-isu strategis di bidang politik, kebangsaan, dan pengelolaan konflik.
2. Memastikan keterpaduan antara Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan kebijakan pembangunan nasional.
3. Menyediakan dasar perencanaan yang jelas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diukur melalui indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*).
4. Membangun sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai stabilitas politik, harmoni sosial, dan penguatan persatuan bangsa.
5. Mengadaptasi rencana kerja organisasi dengan perkembangan kondisi lokal, nasional, dan global untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
6. Menjadi acuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan pada setiap siklus perencanaan pembangunan.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi Tentang penjelasan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan pada priode Renstra.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini menjelaskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kedua regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Sebagai perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas utama untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, badan ini berfungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, dan fasilitasi pengelolaan konflik.
2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Memberikan fasilitasi kepada masyarakat, organisasi masyarakat, dan partai politik untuk mendukung kehidupan politik yang demokratis dan harmonis.
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Lebih lanjut Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Anambas





2.1.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per Januari 2025 berjumlah 20 (dua puluh) Orang terdiri dari 17 (tujuh belas) Pegawai Negeri Sipil dan 3 (tiga) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina Utama Muda	Eselon II.b	1 Orang
Pembina	Eselon III.a	1 Orang
Pembina	Eselon III.b	1 Orang
Penata Tk. I	Eselon III.b	2 Orang
Penata Tk. I	Eselon IV.a	1 Orang
Penata Tk. I	JF	5 Orang
Penata	JF	1 Orang
Penata Muda	Staf	3 Orang
Pengatur Tk. I	Staf	2 Orang
Pengatur	Staf	2 Orang
Golongan IX	Staf	11 Orang
Golongan VII	Staf	1 Orang
Golongan V	Staf	4 Orang
Jumlah		35 Orang

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjumlah 35 orang ASN yang terdiri dari jabatan eselon II.b berjumlah 1 orang, eselon III.a berjumlah 1 orang, eselon III.b berjumlah 3 orang, eselon IV.a berjumlah 1 orang, Jabatan Fungsional berjumlah 6 orang dan staf berjumlah 23 orang.



b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan	
1	P N S : 18 Orang	S2	: 2 Orang
		S1	: 13 Orang
		D3	: 1 Orang
		SMA/SMK	: 3 Orang
2	PPPK : 16 Orang	S1	: 11 Orang
		D3	: 1 Orang
		SMA	: 4 Orang
Jumlah		34 Orang	

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan jenis kelamin yang ada pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari PNS dan PPPK, berikut ini sumber daya aparatur ASN berdasar jenis kelamin.

Tabel 2. 3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN	18	16
Jumlah	18	16

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun, saat ini terdapat tantangan yang signifikan terkait distribusi ASN yang belum merata di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ulang agar ASN dapat



terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan tugas, pokok, dan fungsi yang bersifat koordinatif. Penataan ini juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan ASN yang bertugas didominasi oleh lulusan minimal tingkat Sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berjalan secara seimbang dan efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Selain itu, dalam menghadapi kebutuhan sumber daya aparatur yang terus meningkat, perekrutan ASN menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam lima tahun mendatang. Jumlah ASN yang terbatas saat ini menuntut adanya kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang direncanakan pada tahun 2025. Perekrutan P3K ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, terutama pada unit kerja yang membutuhkan tenaga ahli. Selain itu, aspek kesetaraan gender juga tetap menjadi perhatian, mengingat proporsi aparatur perempuan saat ini sudah cukup memadai. Dengan memastikan keterwakilan gender yang proporsional, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

Tak kalah penting, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.



Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	1 Unit	2016
2	Printer	2 Unit	2016
3	PC	6 Unit	2017
4	Laptop	9 Unit	2017
5	Printer	6 Unit	2017
6	Meja Rapat	1 Unit	2017
7	Meja Kerja Eselon II	1 Buah	2017
8	Meja Kerja Eselon III	5 Buah	2017
9	Meja Kerja Non Struktural	24 Buah	2017
10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	14 Buah	2017
11	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1 Buah	2017
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	2017
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	2017
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10 Buah	2017
15	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	40 Buah	2017
16	Kursi Tamu	1 Set	2017
17	Lemari Arsip	2 Buah	2017
18	Proyektor	1 Buah	2017
19	Meja Kerja I.2 Biro	4 Unit	2018
20	Kursi Kerja Putar	12 Unit	2018
21	Lemari Arsip	4 Unit	2018
22	Lemari Buku	1 Unit	2018
23	Laptop	2 Unit	2018
24	Personal Computer (PC)	2 Unit	2018
25	Lemari Arsip	2 Unit	2019
26	Lemari Buku	2 Unit	2019
27	Laptop	4 Unit	2019
28	Personal Computer (PC)	4 Unit	2019
29	Printer	4 Unit	2019
30	Sepeda Motor (matic)	1 Unit	2020

2.1.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan cerminan dari kemampuan instansi dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya, yakni menjaga



persatuan, harmoni, dan stabilitas sosial-politik di tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan meliputi fasilitasi kegiatan politik, pembinaan organisasi masyarakat, penguatan wawasan kebangsaan, serta mediasi konflik sosial. Dalam pelaksanaannya, kinerja pelayanan ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan optimalisasi peran ASN di setiap unit kerja. Pendekatan yang bersifat koordinatif dan kolaboratif menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh program dan kebijakan berjalan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kinerja pelayanan juga didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas seperti ruang kerja, teknologi informasi, dan perlengkapan administrasi memainkan peran penting dalam mempercepat proses pelayanan. Dengan pemanfaatan teknologi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pengelolaan data dan penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi kinerja secara berkala juga dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan, sehingga kualitas pelayanan terus meningkat dan mampu menjawab tantangan dinamika sosial politik yang berkembang.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;



Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbangpol
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	61,50	64	67	70	73	75	59,64	60,92	-	75,47	-	-	96,98	95,19	-	107,81	-	-
2	Nilai AKIP	-	-	-	62,50	67	69,5	72	75	77	60,67	64,80	67,30	64,80	-	-	97,22	96,72	96,83	90,00		
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	76,69	76,82	77,45	77,75	77,9	78	83,56	90,74	81,86	87,30	-	-	108,96	118,12	105,69	112,28		
4	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	26	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	-	-	-	-	-	-	-	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	-	-	-	-	-	-	-	78,95	81,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan																						
8	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Konflik Sosial di Daerah	-	-	-	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	
9	Jumlah Kasus Pelanggaran Demokrasi	-	-	-	4	4	3	3	2	1	0	0	0	0	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	
10	Jumlah aparatur dan masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pendidikan politik dan kewaspadaan dini	-	-	-	278	300	302	314	326	326	519	363	831	843	-	-	186,69	121,00	275	268,47	-	-	



Berdasarkan data capaian kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi strategisnya menunjukkan pada indikator *Nilai Reformasi Birokrasi* pada tahun 2024 mencapai 75,47 persen. Sementara untuk capaian indikator *Nilai AKIP* pada tahun 2024 sebesar 64,80 persen. Capaian ini mencerminkan upaya instansi dalam memperkuat tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, selaras dengan tujuan reformasi birokrasi nasional.

Di sisi lain, *Indeks Kepuasan Masyarakat* sebagai tolok ukur kualitas pelayanan juga menunjukkan capaian 87,30 persen pada tahun 2024. Selain itu, indikator terkait stabilitas sosial-politik seperti jumlah konflik sosial menunjukkan tidak ditemukannya kasus yang signifikan, hal yang sama terhadap capaian jumlah kasus pelanggaran demokrasi dengan capaian nol kasus pada tahun 2024. Sementara jumlah aparatur dan masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan mencapai 843 orang pada tahun 2024. Data ini menunjukkan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, pelayanan publik yang berkualitas, dan masyarakat yang lebih harmonis serta sadar kebangsaan.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:



Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	N/A	3.785.428.736	4.018.801.263	5.150.888.985	-	-	N/A	3.532.435.003	3.633.491.764	4.179.035.894	-	-	N/A	93,32	90,41	81,13		N/A		
Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	N/A	73.941.400	578.261.700	72.528.840	-	-	N/A	57.684.800	578.261.700	0	-	-	N/A	77,97	100	0		N/A		
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	482.134.218	537.398.718	9.985.797.118	18.256.934.442	-	-	447.118.514	18.035.234.187	9.911.160.164	17.030.963.975	-	-	92,74	79,82	99,25	100		N/A		
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	55.905.000	60.289.600	35.050.000	0	-	-	35.551.200	39.537.500	24.442.549	-	-	-	64,53	65,58	69,74	-		N/A		
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	N/A	335.462.000	179.824.400	200.000.000	-	-	N/A	172.161.700	19.824.400	200.000.000	-	-	N/A	51,32	11,03	100		N/A		
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	N/A	584.026.200	585.881.500	1.020.936.500	-	-	N/A	303.325.700	325.008.231	893.548.910	-	-	N/A	51,89	55,47	87,52		N/A		



2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

1. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah

- 1) Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 2) Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
- 3) Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
- 4) Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi instansi vertikal Pemerintah Pusat, yang bisa menghambat proses pelaksanaan kegiatan.

2. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu

:

- 1) Mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayah yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.
- 2) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam



- kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
- 3) Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
 - 4) Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
 - 5) Tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
 - 6) Kondisi geografis di beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar terdiri dari lautan, kepulauan terluar, daerah terpencil dan daerah perbatasan, yang bisa menghambat akses untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat.
 - 7) Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
 - 8) Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilukada, yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.



b. Peluang

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Dukungan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan. Pengembangan platform digital dapat digunakan untuk penyebaran informasi, pelaporan dini potensi konflik, serta pendidikan politik secara daring kepada masyarakat.

2. Komitmen Pemerintah Daerah

Dukungan dari pemerintah daerah melalui alokasi anggaran dan kebijakan strategis memberikan peluang untuk memperkuat program dan kegiatan. Selain itu, fokus pada penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sejalan dengan prioritas nasional.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat akan pentingnya stabilitas sosial politik semakin meningkat, terutama melalui peran organisasi masyarakat dan tokoh adat. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong kolaborasi dalam pelaksanaan program dan pengelolaan konflik secara lebih efektif.

4. Potensi Kemitraan dengan Organisasi Non-Pemerintah

Peluang kerja sama dengan LSM, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal dapat memperkuat pelaksanaan program. Mitra strategis ini dapat membantu dalam memberikan pelatihan, pendampingan, serta dukungan teknis untuk kegiatan penguatan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini.



2.2. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu – isu strategis tersebut dapat berupa informasi, kejadian, atau fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan dinamika sosial politik yang terus berkembang di masyarakat pada umumnya, dan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada khususnya, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Permasalahan ini berkaitan langsung dengan tugas, pokok, dan fungsi yang diemban, khususnya dalam upaya menjaga stabilitas sosial, memperkuat wawasan kebangsaan, dan mendorong harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam lima tahun ke depan, tantangan-tantangan ini menjadi semakin kompleks, mengingat adanya pengaruh dari perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, serta potensi konflik yang dapat muncul dari berbagai isu politik, sosial, dan budaya di tingkat lokal maupun nasional.

a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila



Masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang berdampak pada lemahnya wawasan kebangsaan.

2) Ketimpangan sosial dan ekonomi

Ketidakseimbangan akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik di daerah terpencil melemahkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

3) Pengaruh budaya asing dan radikalisme

Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai lokal serta ancaman radikalisme dan intoleransi menjadi tantangan serius dalam menjaga harmoni sosial dan agama.

b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat

1) Belum maksimalnya partisipasi politik masyarakat

Tingkat partisipasi politik masyarakat, khususnya generasi muda, masih rendah karena belum optimalnya pendidikan politik yang efektif.

2) Pengelolaan organisasi masyarakat yang belum optimal

Masih adanya organisasi masyarakat yang belum terkoordinasi dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan atau konflik antar kelompok.

3) Belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas politik

Belum optimalnya pengawasan aktivitas politik sehingga berisiko terjadinya pelanggaran demokrasi atau manipulasi kepentingan.

c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

1) Masih minimnya sistem cegah dan deteksi dini konflik



Mekanisme kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial belum terintegrasi dengan baik, sehingga sulit mendeteksi dan mengantisipasi konflik sejak awal.

2) Kurang maksimalnya kapasitas penanganan konflik

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung menjadi kendala dalam penanganan konflik sosial secara cepat dan efektif.

3) Meningkatnya ancaman dari isu sektarian dan primordialisme

Sentimen kelompok berbasis agama, etnis, atau wilayah tertentu masih menjadi salah satu sumber konflik yang dapat memecah persatuan masyarakat.

Untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang efektif, perlu dilakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi instansi, meliputi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan sosial-ekonomi, politik dalam negeri, organisasi masyarakat, kewaspadaan nasional, dan penanganan konflik. Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:

Tabel. 2.7 (Tabel. T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah Yang Dihadapi	Akar Masalah
1	Kurangnya Wawasan Kebangsaan	Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan masih rendah	Minimnya pendidikan ideologi yang terintegrasi dengan kegiatan masyarakat dan sosialisasi intensif
2	Ketimpangan Sosial dan Ekonomi	Ketidakseimbangan akses layanan pendidikan, sosial dan ekonomi	Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta masih minimnya infrastruktur pendukung



No.	Masalah Pokok	Masalah Yang Dihadapi	Akar Masalah
3	Belum Optimalnya Partisipasi Politik	Tingkat partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam proses politik masih rendah	Kurangnya pendidikan politik yang relevan dan menarik bagi masyarakat, khususnya pemilih muda
4	Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan	Masih adanya Organisasi Kemasyarakatan yang belum terkoordinasi dengan baik	Belum maksimalnya pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disebabkan oleh masih minimnya dukungan anggaran
5	Belum Optimalnya Penanganan Konflik	Lambatnya Penanganan konflik sosial	Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana penunjang
6	Masuknya Budaya Asing dan Radikalisme	Pengaruh budaya asing dan radikalisme berpotensi merusak harmoni sosial serta keberagaman budaya lokal	Belum optimalnya pengawasan terhadap penyebaran informasi dan masih lemahnya filterisasi budaya melalui teknologi
7	Potensi Konflik Sosial	Adanya ancaman konflik berbasis etnis, agama, atau kelompok kepentingan	Minimnya sistem cegah dan deteksi dini konflik

Pemetaan ini menjadi langkah awal dalam menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung stabilitas sosial-politik di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima tahun kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam lima (5) misi sebagai berikut :



1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur;
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Pelayanan Prima melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif;
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata;
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat pada Misi 1 (satu) **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur”** dan Misi 3 (tiga) **“Mewujudkan Pelayanan Prima melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif”**, dengan sasaran Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM serta Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas.

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi hambatan antara lain :

- a. Belum terpenuhinya SDM yang sesuai SOTK di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Belum optimalnya dukungan dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- c. Belum memadainya sarana prasarana pendukung.

Adapun faktor pendorong dalam pencapaian visi dan misi



kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut :

- a. Adanya Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Adanya penganggaran yang tepat sasaran sesuai dengan program dan kegiatan;
- c. Adanya penguatan peran dan fungsi yang baik pada internal OPD maupun *stakeholder* terkait.

2.2.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024), dengan dipandu Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 adalah:

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Inovatif, dan Kolaboratif (APIK) sebagai poros Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia.



2. Memperkuat tata kelola pemerintahan dalam negeri, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kewilayahan berbasis otonomi daerah, sinergi dan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan umum, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis

- 1) Menguatnya implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia;
- 2) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan;

b. Sasaran Strategis

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis yaitu **“Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional”**, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian, meliputi:
 - (a) Indeks Demokrasi Indonesia;
 - (b) Indeks Harmoni Indonesia.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2 ditetapkan Sasaran



Strategis yaitu **“Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan tata kelola pemerintahan dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian”**, meliputi:

- (a) Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN);
- (b) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB).

2.2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, pada pasal 6 Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten dalam jangka panjang. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi :

1. Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan;
2. Keterbatasan luas lahan daratan hanya 1,35%, sementara kawasan budidaya atau laut yaitu 98,65% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
3. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Natuna Utara sehingga mempunyai potensi ekspor hasil olahan laut yang besar;
4. Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung



penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 20 tahun mendatang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan /resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Selanjutnya Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan pada Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila, Kondusifitas Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang sejalan dengan muatan KLHS.



2.2.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah serta menyesuaikan dengan dinamika sosial politik yang terus berkembang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi beberapa isu strategis yang perlu menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi badan, serta tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut :

a. Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila

Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi tantangan yang harus diatasi. Penguatan ideologi kebangsaan melalui pendidikan formal, sosialisasi, dan kegiatan lintas sektor menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang kokoh terhadap nilai-nilai dasar negara.

b. Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki keberagaman etnis, suku, agama, dan budaya memerlukan sistem deteksi dini potensi konflik sosial. Upaya pencegahan konflik berbasis partisipasi masyarakat perlu diperkuat, termasuk peningkatan kapasitas aparatur dan tokoh masyarakat dalam mediasi dan resolusi konflik.

c. Peningkatan Partisipasi Politik yang Inklusif

Partisipasi politik masyarakat, khususnya generasi muda dan perempuan, masih perlu ditingkatkan. Langkah strategis meliputi edukasi politik, fasilitasi keterlibatan aktif dalam proses pemilu, dan penguatan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan partisipatif.



d. Stabilitas Sosial Politik dalam Era Digitalisasi

Perkembangan teknologi informasi membawa peluang sekaligus ancaman, terutama dalam penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu mengembangkan strategi komunikasi digital dan penguatan literasi digital masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial politik.

e. Penguatan Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah terpencil menjadi isu yang harus ditangani untuk menciptakan keadilan sosial. Selain itu, pengaruh budaya asing dan tantangan globalisasi memerlukan upaya pelestarian budaya lokal serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial.

f. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Wilayah Perbatasan

Sebagai wilayah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Anambas rentan terhadap ancaman seperti penyelundupan, peredaran gelap narkoba, dan pelanggaran kedaulatan. Penguatan kewaspadaan nasional melalui koordinasi lintas sektor dan pengawasan berbasis teknologi perlu menjadi prioritas.

g. Pengelolaan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Pembinaan yang lebih intensif terhadap organisasi masyarakat diperlukan untuk memastikan mereka berkontribusi secara positif dalam pembangunan daerah dan menjaga kondisi yang harmonis.

Isu-isu strategis ini menjadi panduan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merumuskan program kerja yang relevan dan berkelanjutan. Fokus pada penguatan wawasan kebangsaan, pencegahan konflik, partisipasi politik, dan ketahanan wilayah akan mendukung tercapainya visi daerah menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai bagian integral dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan yang baik serta menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan di daerah. Untuk itu, perlu merumuskan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan lingkungan sosial politik yang kondusif.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan ini mencerminkan upaya konkret dalam mencapai keberhasilan dalam reformasi birokrasi, penguatan ideologi kebangsaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya sasaran yang jelas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya, serta memastikan bahwa berbagai program pembangunan daerah yang relevan dengan tugasnya dapat terlaksana dengan baik.

Berikut ini adalah tabel yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas, beserta indikator kinerja dan target yang telah disusun untuk lima tahun mendatang, yakni dari 2025 hingga 2029.



**Tabel. 3.1. (Tabel T-C. 25.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Predikat AKIP	B	B	BB	BB	BB	BB	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai AKIP	62,50	67,00	69,50	72,00	75,00	76,00	
Meningkatnya Stabilitas Sosial dan Kehidupan Beragama yang Rukun	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Kehidupan Beragama yang Rukun		Indeks Kerukunan Umat Beragama	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,99	
		Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	65,00	65,00	67,50	67,50	67,50	67,50	



3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengimplementasikan berbagai strategi dan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pencapaian hasil yang diinginkan. Strategi ini akan melibatkan pendekatan yang berbasis pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, pengelolaan konflik sosial dan penguatan ideologi kebangsaan juga akan menjadi fokus dalam pencapaian tujuan tersebut.

Strategi yang dirumuskan bertujuan untuk memperkuat stabilitas sosial, politik, serta meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Dalam hal ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyelenggaraan program-program yang relevan akan menjadi langkah utama. Adapun arahan kebijakan akan diarahkan pada penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:

Tabel. 3.2 (Table T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera				
Misi : Mewujudkan Pelayanan Prima melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan transparansi pelayanan publik	Penyempurnaan sistem pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi



Visi : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera				
Misi : Mewujudkan Pelayanan Prima melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Optimalisasi penggunaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan rencana strategis dengan pelibatan masyarakat
			Sosialisasi program pelayanan publik dan penguatan kapasitas aparatur	Evaluasi kepuasan masyarakat melalui survei tahunan
2	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama	Tingkat Partisipasi Dalam Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama	Memperkuat internalisasi nilai-nilai Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama
		Meningkatnya Kualitas Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
		Meningkatnya Penanganan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik yang Diselesaikan	Persentase Penanganan Masalah Gangguan Konflik yang Diselesaikan	Melakukan pembinaan penanganan konflik sosial

Tabel ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya mencapai tujuan jangka menengah. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial-politik di Kabupaten Kepulauan Anambas.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas serta menjaga stabilitas sosial-politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan sejumlah program strategis yang akan menjadi fokus pelaksanaan selama periode 2025–2029. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dan isu strategis yang telah teridentifikasi sebelumnya, sekaligus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terintegrasi.

Program-program tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti penguatan ideologi Pancasila, pendidikan politik, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, hingga penanganan konflik sosial. Melalui pelaksanaan program-program ini, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang lebih sadar politik, harmonis secara sosial, dan memiliki daya tahan yang kuat terhadap berbagai dinamika ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung stabilitas dan pembangunan daerah.

Berikut adalah daftar program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:



4.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar unit pemerintahan untuk mendukung tata kelola yang efisien dan efektif.

4.1.2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan pembinaan.

4.1.3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat serta mendorong partai politik dan lembaga pendidikan berperan aktif dalam membangun budaya politik yang etis dan demokratis.

4.1.4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini mendukung penguatan peran dan fungsi organisasi masyarakat untuk mendorong aktivitas yang produktif dan kontributif bagi pembangunan daerah.

4.1.5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang tangguh menghadapi berbagai tantangan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya melalui pemberdayaan komunitas.



4.1.6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program ini bertujuan untuk meminimalkan risiko konflik sosial dan meningkatkan kewaspadaan nasional melalui pendekatan preventif dan fasilitatif.

Adapun teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan dan Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan kegiatan ini akan disajikan pada tabel berikut.



Tabel. 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Anambas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya pemerintahan yang amanah, berintegritas dan kolaboratif	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Transparan Akuntabel dan Pelayanan yang berkuaitas	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Terlaksananya Predikat AKIP, Nilai AKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat	Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Kepuasan Masyarakat		
					Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah DPA Perubahan - SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						



					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Persentase pelaksanaan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Persentase pengadaan sarana dan prasarna sesuai kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	



					umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Persentase pemeliharaan sarara dan prasarana perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, cepat, ramah dan inovatif	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Meningkatnya Kualitas Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Terlaksananya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
		Meningkatnya kualitas perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter		Terlaksananya Koordinasi Pembauran Kebangsaan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Pembauran Kebangsaan,	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	



		Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas Paskibraka		Terlaksananya Kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, cepat, ramah dan inovatif	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Tersusunnya kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
		Meningkatnya kualitas perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Terlaksananya Koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		Meningkatnya Kualitas Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika		Tersusunnya Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Jumlah Kebijakan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,		Terlaksananya Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	



		Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, cepat, ramah dan inovatif	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Peningkatan kualitas Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Terlaksananya pendidikan politik pada kader partai politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
		Meningkatnya kualitas perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilahan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilahan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	



		Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, cepat, ramah dan inovatif	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Meningkatnya ketertiban organisasi masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat yang aktif	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
		Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, cepat, ramah dan inovatif	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Peningkatan kualitas Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Terselesainya konflik sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
		Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan		Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Terkait	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	



		Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik di Daerah		
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Tersusunnya Laporan Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota



Tabel. 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Anambas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,69	76,82		77,45		77,75		77,90		79,00	
	Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	90%	90%	5.066.230.803	92%	4.736.811.794	93%	4.749.142.448	94%	4.813.936.407	95%	4.962.490.106
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja perangkat daerah secara tepat waktu, akurat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	12 Data	500.000	12 Data	500.000	12 Data	500.000	12 Data	500.000	12 Data	500.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
Terlaksananya pengelolaan dan pencatatan administrasi Barang Milik Daerah secara tertib, akurat, dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase administrasi Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib dan sesuai ketentuan	100%	100%	16.428.000	100%	16.428.000	100%	16.428.000	100%	16.428.000	100%	16.428.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	16.428.000	12 Laporan	16.428.000	12 Laporan	16.428.000	12 Laporan	16.428.000	12 Laporan	16.428.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4.261.732.341	100%	4.302.984.064	100%	4.344.648.305	100%	4.386.729.188	100%	4.429.230.880
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	14 Orang	4.125.172.341	14 Orang	4.166.424.064	14 Orang	4.208.088.305	14 Orang	4.250.169.188	14 Orang	4.292.670.880



Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Dokumen	136.560.000	12 Dokumen	136.560.000	12 Dokumen	136.560.000	12 Dokumen	136.560.000	12 Dokumen	136.560.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang mencakup penyediaan bahan perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran	100%	100%	290.820.462	100%	346.149.730	100%	316.816.143	100%	339.529.219	100	354.331.226
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	39.000.000	5 Paket	65.000.000	4 Paket	40.000.000	4 Paket	40.000.000	4 Paket	40.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10.399.730	3 Paket	10.399.730	4 Paket	32.066.143	5 Paket	44.959.219	6 Paket	53.831.226
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	40.000.000	5 Paket	66.000.000	4 Paket	40.000.000	4 Paket	40.000.000	4 Paket	40.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	2 Paket	30.000.000	3 Paket	40.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	181.420.732	2 Laporan	184.750.000	2 Laporan	184.750.000	2 Laporan	184.570.000	2 Laporan	180.500.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Tersedianya Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, serta Gedung Kantor/Bangunan untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	100%	70%	458.000.000	80%	-	80%	-	80%	-	85%	87.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	5 Unit	129.000.000	0%	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	6 Unit	130.000.000	0%	-	-	-	-	-	-	87.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket	199.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Tersedianya layanan jasa administrasi perkantoran dan langganan operasional yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	-	80%	30.250.000	80%	30.250.000	80%	30.250.000	80%	30.250.000	80%	34.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.250.000	12 Laporan	4.250.000	12 Laporan	4.250.000	12 Laporan	4.250.000	12 Laporan	8.500.000



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Tersedianya Layanan Jasa dan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, serta Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang Milik daerah yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak/Perizinannya	0 Unit	6 Unit	8.000.000	21 Unit	40.000.000	21 Unit	40.000.000	21 Unit	40.000.000	21 Unit	40.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	2 Unit	5.000.000	7 Unit	20.000.000	7 Unit	20.000.000	7 Unit	20.000.000	7 Unit	20.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	4 Unit	3.000.000	14 Unit	20.000.000	14 Unit	20.000.000	14 Unit	20.000.000	14 Unit	20.000.000
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan												
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	912.140.783	100%	1.275.927.223	100%	1.352.964.001	100%	1.387.537.474	100%	1.318.351.207
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan												
Terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	498 Orang	58 Orang	912.140.783	58 Orang	1.275.927.223	58 Orang	1.352.964.001	63 Orang	1.387.537.474	63 Orang	1.318.351.207
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	472 Orang	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	120.000.000	30 Orang	120.000.000	30 Orang	150.000.000
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	26 Orang	26 Orang	812.140.783	26 Orang	1.175.927.223	28 Orang	1.232.964.001	28 Orang	1.267.537.474	28 Orang	1.168.351.207
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA												
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	100%	100%	135.000.000	100%	140.000.000	100%	160.000.000	100%	170.000.000	100%	200.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya												
Terselenggaranya kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang diikuti oleh peserta	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	652 Orang	31 Orang	135.000.000	31 Orang	140.000.000	31 Orang	160.000.000	31 Orang	170.000.000	31 Orang	200.000.000



Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Peng hayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	652 Orang	31 Orang	100.000.000	31 Orang	100.000.000	31 Orang	120.000.000	31 Orang	120.000.000	31 Orang	150.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK												
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	100	85%	460.363.589	87%	470.363.590	89%	480.363.589	90%	490.363.589	92%	500.363.589
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik												
Terlaksananya pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilahan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 Orang	330 Orang	460.363.589	330 Orang	470.363.590	440 Orang	480.363.589	440 Orang	490.363.589	440 Orang	500.363.589
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 Orang	132 Orang	450.363.589	132 Orang	450.363.590	132 Orang	450.363.589	440 Orang	450.363.589	440 Orang	450.363.589
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	30.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	50.000.000
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN												



Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	-	81,58%	14.636.411	84,21%	44.636.411	86,84%	64.636.411	89,47%	84.636.411	90%	104.636.411
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan												
Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1 Laporan	1 Laporan	14.636.411	1 Laporan	44.636.411	1 Laporan	64.636.411	1 Laporan	84.636.411	1 Laporan	104.636.411
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	14.636.411	1 Laporan	44.636.411	1 Laporan	64.636.411	1 Laporan	84.636.411	1 Laporan	104.636.411
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL												
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase konflik yang diselesaikan	83%	100%	380.000.000	100%	440.000.000	100%	440.000.000	100%	440.000.000	100%	440.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial												
Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	9 Orang	42 Orang	380.000.000	42 Orang	440.000.000	42 Orang	440.000.000	42 Orang	440.000.000	42 Orang	440.000.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9 Orang	9 orang	-	9 orang	60.000.000	9 orang	40.000.000	9 orang	40.000.000	9 orang	40.000.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	33 Orang	18.000.000	33 Orang	80.000.000	33 Orang	80.000.000	33 Orang	80.000.000	33 Orang	80.000.000
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Kali	2 Dokumen	362.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	320.000.000	2 Dokumen	320.000.000	2 Dokumen	320.000.000



Tabel. 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Pelaksanaan Tugas Paskibraka	
2	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
4	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
5	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah	
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	



4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode lima tahun ke depan diarahkan untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang berkualitas serta stabilitas politik dan sosial yang kondusif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi daerah yang mengutamakan peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, penguatan ideologi kebangsaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial-politik.

Capaian kinerja pada bidang urusan difokuskan pada indikator-indikator yang mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator kinerja ini mencakup berbagai aspek seperti nilai reformasi birokrasi, indeks kepuasan masyarakat, jumlah konflik sosial, jumlah pelanggaran demokrasi, hingga tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program strategis yang diselenggarakan. Dengan demikian, target kinerja dirancang secara terukur untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program prioritas.

Berikut adalah tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

Tabel. 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai AKIP	Nilai	62,50	67,00	69,50	72,00	75,00	76,00	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	76,69 (Baik)	76,82 (Baik)	77,45 (Baik)	77,75 (Baik)	77,90 (Baik)	79,00 (Baik)	
3	Indeks Harmoni Indonesia	Persen	65,00	65,00	67,50	67,50	67,50	67,50	



Tabel. 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	85%	85%	85%	87%	89%	89%	
2	Persentase pengurangan konflik SARA	Persen	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
3	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Persen	86%	86%	86%	88%	90%	90%	
4	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	70%	70%	75%	77%	80%	82%	
5	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik	Orang	330	330	330	440	440	440	
6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Persen	78,95%	81,58%	84,21%	86,84%	89,47%	90%	
7	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan FORKOPIMDA	Kali	2	2	3	3	3	3	
8	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	85%	85%	87%	89%	90%	91%	
9	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	%	-	-	-	-	-	91,05	



Tabel ini mencerminkan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.



BAB V PENUTUP


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki peran strategis dalam menciptakan stabilitas sosial, politik, dan ideologi di tengah masyarakat. Melalui pelaksanaan program-program prioritas yang berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, penguatan ideologi kebangsaan, dan pengembangan wawasan kebangsaan, diharapkan seluruh sasaran strategis dapat tercapai secara efektif dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Kesuksesan ini tidak hanya akan mendukung tercapainya visi pembangunan daerah tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat bergantung pada kolaborasi yang sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah, masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan. Dukungan berupa kebijakan, sumber daya, serta partisipasi aktif dari seluruh pihak merupakan kunci dalam mengatasi tantangan yang ada dan mengoptimalkan peluang untuk kemajuan bersama. Dengan semangat inovasi dan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik guna mewujudkan masyarakat yang harmonis, maju, dan sejahtera.

Tarempa, 15 September 2025

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik




Herry Fakhrizal, S.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19730823 200312 1 004